

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal dan Artikel *Internet*

(ed), J. C. (1995). *Good Corporate Governance*. New York: Oxford Advanced Learners Dictionary.

Ali, C. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni Bandung.

Anggraini, A. M. (2013). Sinergi BUMN dalam pengadaan barang dan atau jasa dalam perspektif persaingan usaha. *Jurnal Mimbar Hukum Volume 25*, 1.

Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Berghe, L. V. (1999). *International Standardization of GCG*. Netherlands: Kluwer Academic.

Daniri, M. A. (2014). *Lead By GCG*. Jakarta: Gagas Bisnis.

Effendi, M. A. (2009). *The Power of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Emirzon, J. (2007). *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

Fahrurrazi, S. R. (2014). *Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visi Media Pustaka.

Fuady, M. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law : Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2002). *Perseroan Terbatas dalam Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah. (2009). *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

- Ibrahim. (2003). *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo.
- ICJR. (2015). *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ICJR.
- Ilmar, A. (2012). *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kahan, D. R. (2016). Shareholder Liability For Corporate Torts : A Historical Perspective. *Georgetown University Journal*, 97.
- Kaihatu, T. S. (2020, September 21). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Retrieved from Puslit.petra.ac.od:  
<http://puslit.petra.ac.id/files/published/journals/MAN/MAN060801/MAN060810.pdf>
- Kamello, T. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam Rancangan Merger diantara BUMN*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementrian BUMN. (2004-2014). Master Plan. *Master Plan Kementrian BUMN*, p. 80.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- Komaruddin. (1982). *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*. Jakarta: Alumni.
- Kurniawan, W. (2012). *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Mamudji, S. S. (2006). *Pengertian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moeljono, D. (2005). *Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2005). *Badan Usaha Milik Negara Isu Kebijakan dan Strategis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pramono, N. (2006). *Bunga Rampai Hukum Bisnis Actual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, M. d. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- PT Angkasa Pura Solusi. (2020, September 22). *www.angkasapurasolusi.co.id*. Retrieved from Corporate Website: <https://www.angkasapurasolusi.co.id/about/pages/MQ>
- Purba, M. P. (2014). *Pengadaan Barang dan Jasa BUMN*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Purwosusilo. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2*, 276.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Good Corporate Governance bagian Ketiga*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan-Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Simarmata, L. J. (2007). *Good Corporate Governance pada Bank*. Bandung: PT Hikayat Dunia.
- Simatupang, R. B. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjawie, H. F. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sogar, A. Y. (2009). *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sulistiowati. (2013). *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Susanti, M. Y. (2012). *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Sutedi, A. (2008). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjager, I. N. (2002). *Corporate Governance - Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Tunggal, I. S. (2002). *Membangun Good Corporate Governance*. Jakarta: Haryarindo.
- Untung, H. B. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Westra, P. (2002). *Administrasi Perusahaan Negara (Perkembangan dan Permasalahan)*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wibowo, E. (2004). *Memahami Good Government Governance & Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Wilamarta, M. (2007). *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*. Jakarta: Center for Education and Legal Studies.

- Wilamarta, M. (2007). *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*. Jakarta: Center for Education and Legal Studies.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Zihaningrum, A. (2016). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law Vol. IV No. 1*, 112.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Republik Indoneisa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor PER-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- Peraturan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor PER-12/M-MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1960 Tentang *Perusahaan N.V. Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V) dan N.V. Semarang Veer*;
- Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapa Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;